

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan serta temuan-temuan di lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Absen Elektronik (*Finger Print*) bagi PNS di Lingkup Pemerintah Kecamatan Limboto telah berjalan dengan baik mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan sampai dengan Pengawasan dan Evaluasi kebijakan, hal ini ditandai dengan tingkat kehadiran PNS hingga bulan Nopember tahun 2020 mencapai 94%.
2. Faktor penentu Implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari (*finger print*) bagi PNS di Kantor Camat Limboto yang berjalan sejak tahun 2019 telah berjalan optimal sebagaimana mestinya. Adapun Kebijakan tersebut ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya: (1) Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan BKD, Camat dengan bawahannya terkait implementasi kebijakan absen elektronik sudah baik dengan selalu memantau PNS, BKD dan pihak Kecamatan juga telah memberikan sosialisasi secara maksimal dan bertahap. (2) SDM PNS di lingkungan Kantor Camat Limboto sebelum diterapkan sudah mengetahui tentang penerapan absen elektronik dan mereka telah siap melaksanakannya, PNS mendukung implementasi ini namun terdapat kekurangan yakni akses bagi beberapa Kelurahan terluar yang menjadi penghambat bagi PNS yang bertugas di wilayah Kelurahan terluar

seperti Kelurahan Polohungo, Tilihuwa, Biyonga dan Malahu. (3) Disposisi / Sikap para pelaksana yakni para PNS telah mendukung kebijakan ini, serta kinerja PNS diukur dari ekinerja dan dinilai oleh atasan langsung. (4) Struktur birokrasi berjalan baik, Pengawasan pimpinan sangat ketat, Camat melibatkan para Lurah dalam pengawasan aparat. PNS juga telah memahami pelaksanaan absen elektronik sesuai dengan perbup 61 tahun 2019 dimana penerapan pemotongan TPP bagi PNS yang terlambat dan tidak melakukan absen elektronik telah dilaksanakan sesuai SOP. (5) indikator lainnya yang peneliti temukan adalah *Force Majeure* (keadaan kahar) yang menjadi faktor tambahan yang ditemukan di Lapangan. Dengan adanya *Pandemic Covid-19*, kebijakan absen elektronik sidik jari (*finger print*) tidak dapat dilaksanakan selama 3 Bulan dan diaktifkan kembali di era *New Normal*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo untuk dapat mengadakan paket *finger print* lengkap beserta akses jaringan dan kabel mikrotik bagi Kelurahan wilayah terluar yang ada di Kecamatan Limboto agar PNS yang bertugas disana tidak terbebani untuk melaksanakan *finger print* di pusat kota (kantor Camat), sehingga mempermudah PNS yang bertugas di Kelurahan

tersebut dalam menjalankan tugasnya;

2. Pemerintah Daerah agar segera menambah kapasitas server di BKD sehingga system SIKAP-GO dan EKINERJA yang saat ini masih dalam tahap pengembangan sehingga bisa berjalan maksimal;
3. Pemerintah Daerah perlu memikirkan Langkah-langkah strategis dalam menghadapi perkembangan teknologi kedepannya misalnya dapat mempersiapkan sebuah aplikasi berbasis smartphone yang dapat diakses dimana saja dalam rangka mengukur kedisiplinan dan kinerja PNS;
4. Perlu penguatan kepada seluruh PNS di Limboto untuk terus menjaga eksistensi lembaga tempatnya bekerja secara khusus dan Pemda secara umum serta jati dirinya sebagai PNS yang selalu menjaga sikap disiplin dan meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat.;
5. Para PNS agar meningkatkan kapasitas diri masing-masing dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Agustino, Leo. 2016 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Alda. 2013. *Penerapan Sistem Absensi Otomatis Pada Instansi Pemerintahan, Laporan Akhir*, Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Anoraga, Pandji. 2006. *Psikologi Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bejo, Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*, Jakarta: Bumi Aksara
- BP-7 Pusat. 1993. *Wawasan Kerja Aparatur Negara*. Jakarta: BP-7 Pusat
- Davis, B. Gordon. 1992. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian II: Struktur dan Pengembangannya*, terj. Widyahartono, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo
- Erwan, Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Faisal. 2006. *Hubungan Penerapan Absensi Sidik Jari (Finger Print) Dengan Motivasi dan Kinerja Karyawan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor*, Tesis, Bogor: Institut Pertanian
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Harsono, Hanifah. 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hasibuan, Malayu. 2003. *Manajemen Personalia*, Yogyakarta: BPF
- Husein, Umar. 2000. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- I.S. Livine. 1980. *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*, terj. Iral Soedjono, Jakarta: Cemerlang.

- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. 2015. *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum: Veritas et Justitia.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mangkunegara A P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marrus, K. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta; Rajawali Press
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moenir, AS. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif .Cetakan Keempat*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant, 2006 *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang (Model- Model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani,. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung : CV.Alfabet
- Rivai, Veithzal, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Murai Kencana,
- Setiawan, Guntur. 2004 *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Siagian, S.P 2002. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta Gunung Agung.
- Sinungan, Muchdarasyah, 2003. *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, Bejo. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif danOperasional*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

- Sulila, I. 2015. *Inovasi Manajemen Layanan Publik Dalam upaya meningkatkan investasi ekonomi di daerah* (Studi Pada Pemerintah Kota Gorontalo). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4 (35).
- Suradinata, Ermaya. 2007. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, Astrid S. 2010. *Komunikasi dalam teori dan praktik*. Jakarta: Bina Cipta.
- Syafei, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Askara
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Lukman Offset.
- Usman, Nurdin 2002, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar Baru.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Yunus. A. 2014. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (Fungsi-fungsi Manajemen)*. Majalengka : Unit Penerbitan Universitas Majalengka.
- Yuwono, Sutopo. 2009. *Dasar – Dasar Produksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) No.B/2338/M.PANRB/06/2016 tertanggal 27 Juni perihal Optimalisasi Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Bupati (Perbup) Gorontalo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Surat Edaran Nomor 800/BK-Diklat/334/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Instruksi Bupati Nomor: 800/BK-Diklat/387/IV/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan COVID-19

Surat Edaran Nomor 800/BK-Diklat/678/VII/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Norma Perilaku Baru Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Surat Edaran Camat Limboto Nomor:800/115/Kec.Limboto/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Limboto.

Website

<https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>

(diakses tanggal 13 Januari 2021 : 11.13 WITA)

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2572/keadaan-memaksa--](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2572/keadaan-memaksa--force-majeur/)

[force-majeur/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2572/keadaan-memaksa--force-majeur/) (diakses tanggal 13 Januari 2021 : 12.31 WITA)

<https://gosulut.id/post/56-pejabat-di-kabupaten-gorontalo-dipimpin-sekretaris-daerah-ucapkan-rasa-syukur> (diakses tanggal 13 Januari 2021 : 13.26 WITA)

<https://www.read.id/56-pejabat-positif-covid-19-di-pemkab-gorontalo-dinyatakan-sembuh/> (diakses tanggal 13 Januari 2021 : 13.45 WITA)

<https://www.kompas.tv/article/99448/58-asn-positif-covid-19-9-diantaranya-kadis-dan-sekda-kab-gorontalo> (diakses tanggal 13 Januari 2021 : 13.53 WITA)

<http://kabupatenlestari.org/berita/read/kesiapan-kabupaten-gorontalo-menghadapi-new-normal> (diakses tanggal 13 Januari 2021 : 14.39 WITA)

https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar (diakses tanggal 13 Januari 2021 : 14.50 WITA)